



TESIS

STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA MELALUI PENDEKATAN LANSKAP (STUDI KASUS DESA BULUE, KABUPATEN SOPPENG)

ECOTOURISM DEVELOPMENT STRATEGY THROUGH LANDSCAPE APPROACH (A CASE STUDY OF BULUE VILLAGE, SOPPENG DISTRICT)

Oleh:

**EKO YUWONO
P022181044**



**PROGRAM STUDI
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



**STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA MELALUI
PENDEKATAN LANSKAP (STUDI KASUS DESA BULUE,
KABUPATEN SOPPENG)**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

**EKO YUWONO
P022181044**

Kepada

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



TESIS

STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA MELALUI PENDEKATAN LANSKAP (STUDI KASUS DESA BULUE, KABUPATEN SOPPENG)

Disusun dan diajukan oleh

EKO YUWONO
Nomor Pokok P022181044

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 04 Agustus 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,

Dr. Ir. Roland A. Barkey
Ketua

Dr. Risma Illa Maulany, S.Hut., M.NatResSt
Anggota

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah,

Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : **EKO YUWONO**

Nomor Mahasiswa : **P022181044**

Program studi : **Perencanaan dan Pengembangan Wilayah**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2020

Yang menyatakan



EKO YUWONO



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya laporan penelitian yang berjudul “*Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Pendekatan Lanskap (Studi Kasus Desa Bulue, Kabupaten Soppeng)*” yang merupakan salah satu syarat untuk penyelesaian studi magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang kondisi lanskap Desa Bulue yang sebagian besar wilayahnya termasuk dalam kawasan hutan negara dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Soppeng sekaligus Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Sulawesi Selatan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. Inti utama yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait strategi yang dapat dirumuskan untuk pengembangan ekowisata melalui pendekatan lanskap. Adanya strategi tersebut diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan terkait dengan belum adanya sinergi dalam pengembangan potensi wisata alam lanskap Desa Bulue sebagai kawasan strategis, adanya aktivitas wisata alam yang cenderung bersifat masal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan adanya potensi kerusakan keindahan lanskap oleh aktivitas mata pencaharian masyarakat daerah penyangga.



Penulis menyadari bahwa dalam proses pelaksanaan penelitian sampai dengan penyusunan laporan banyak kendala yang dihadapi. Namun, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada **Dr. Roland A. Barkey** selaku ketua komisi penasehat dan **Dr. Risma Illa Maulany, S.Hut., M.Nat.Rest** selaku anggota komisi penasehat yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen penguji antara lain: **Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA; Dr. M. Ramli AT., M.Si.**; serta **Dr. Ir. Mahmud Ahcmad MP** yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan laporan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu namun belum sempat disebutkan satu per satu.

Makassar, Agustus 2020

EKO YUWONO



ABSTRAK

EKO YUWONO. *Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Pendekatan Lanskap (Studi Kasus Desa Bulue, Kabupaten Soppeng)* (dibimbing oleh **Roland A Barkey** dan **Risma Illa Maulany**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) keterkaitan antara rencana pengembangan wisata alam TWA Lejja dan daerah penyangga (lanskap Desa Bulue) dengan pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng; (2) persepsi pelaku wisata terhadap tingkat keberlanjutan destinasi wisata alam TWA Lejja; (3) kesesuaian lanskap Desa Bulue untuk ekowisata; dan (4) merumuskan strategi pengembangan ekowisata Desa Bulue melalui pendekatan lanskap.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengkaji keterkaitan antar rencana pengembangan wisata, persepsi pelaku wisata dan potensi wisata alam. Sedangkan *scenic beauty estimation* (SBE) digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan pengunjung terhadap keindahan potensi wisata alam dan *spatial multicriteria decision analysis* (integrasi GIS dan AHP) untuk mengkaji kesesuaian lanskap untuk ekowisata. Kemudian strategi pengembangan ekowisata dirumuskan dengan *force field analysis* (analisis medan kekuatan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum (1) terdapat keterkaitan antara kebijakan pengembangan wisata alam lanskap Desa Bulue (TWA Lejja dan daerah penyangga) dengan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai kawasan strategis dan kawasan peruntukan wisata alam. Namun, belum terdapat acuan keterpaduan bagi pengembangan wisata alam yang terintegrasi pada lanskap Desa Bulue. (2) Persepsi pelaku wisata terhadap tingkat keberlanjutan destinasi wisata alam TWA Lejja adalah belum baik. (3) Terdapat kesesuaian lokasi pada lanskap Desa Bulue untuk pengembangan ekowisata. (4) Prioritas strategi pengembangan ekowisata Desa Bulue adalah mengembangkan *community based ecotourism* dan membangun model pengelolaan sampah wisata TWA Lejja.

Kata Kunci: ekowisata berbasis lanskap, perencanaan ekowisata, strategi, Desa Bulue



ABSTRACT

EKO YUWONO. *Ecotourism Development Strategy Through Landscape Approach (Case Study of Bulue Village, Soppeng District)* (supervised by **Roland A Barkey** and **Risma Illa Maulany**)

The aims of this research are to: (1) examine the linkage between the natural tourism development plan of Lejja Recreation Park and its buffer zone (Bulue Village landscape) with the regional development plan of the Soppeng District; (2) examine the perception of tourism actors towards the sustainability level of Lejja Recreation Park natural tourism destination; (3) analyse the suitability of Bulue Village landscape for ecotourism; and (4) formulate the ecotourism development strategy of Bulue Village through landscape approach.

This research used descriptive analysis method to examine the linkage between tourism development plan, the perception of tourism actors, and the potential of natural tourism. Meanwhile, Scenic Beauty Estimation (SBE) was used to measure the visitors' preference level of the beauty of nature tourism potentials and spatial multi-criteria decision analysis (integration of GIS and AHP) to analyse the suitability of landscape for ecotourism. Then, the strategy of ecotourism development was formulated with force field analysis.

The results of the research indicate that in general (1) there is a linkage between the natural tourism development policy of Bulue Village landscape (Lejja Recreation Park and its buffer zone) and the regional development policy of Soppeng District as the strategic and tourism area. However, there has not been masterplan of integrated natural tourism development of Bulue Village landscape. (2) The perception of tourism actors towards the sustainability level of Lejja Recreation Park natural tourism destination has not been good. (3) There is the site suitability of Bulue Village landscape for ecotourism development. (4) The ecotourism development priority strategy of Bulue Village is to develop community based ecotourism and to develop Lejja Recreation Park tourism waste management model.

Key words: landscape based ecotourism, ecotourism planning, strategy, Bulue Village



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR PERSAMAAN.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup.....	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pemanfaatan Taman Wisata Alam	8
B. Pengelolaan Daerah Penyangga	8
C. Lanskap dan Pendekatan Lanskap.....	10
D. Ekowisata	11
E. Persepsi Pelaku Wisata	13
F. Sustainability Destinasi Wisata.....	16
G. Analisis Multi-kriteria untuk Kesesuaian Ekowisata.....	20
H. Estimasi Keindahan Pemandangan	25



I.	Analisis Medan Kekuatan	27
J.	Kerangka Pemikiran	28
BAB III		31
METODE PENELITIAN		31
A.	Jenis Penelitian	31
B.	Waktu dan Lokasi Penelitian	31
C.	Jenis dan Sumber Data	32
D.	Populasi dan Sampel	33
E.	Teknik Pengumpulan Data	35
1.	Variabel Kebijakan	35
2.	Variabel Sosial	35
3.	Variabel Potensi Wisata	36
4.	Variabel Keindahan Potensi Wisata	36
5.	Variabel Kriteria Evaluasi Kesesuaian Ekowisata	38
6.	Variabel Bobot Kriteria Evaluasi	41
7.	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	43
F.	Teknik Analisa Data	45
1.	Analisis Deskriptif	45
2.	Analisis Keindahan Pemandangan Potensi Wisata	45
3.	Analisis Kesesuaian Ekowisata	46
4.	Perumusan Strategi	48
G.	Definisi Operasional	49
BAB IV		54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		54
A.	Keterkaitan Rencana Pengembangan Wilayah	54
B.	Keberlanjutan Destinasi Wisata Alam TWA Lejja	61
1.	Karakteristik Pelaku Wisata	61
2.	Aktivitas Wisata Alam	62
3.	Tingkat Keberlanjutan Destinasi	64
C.	Kesesuaian Ekowisata Lanskap Desa Bulue	67
1.	Penutupan Lahan	67



2.	Potensi Wisata Alam dan Estimasi Keindahan	71
3.	Evaluasi Kesesuaian Ekowisata.....	78
3.1.	Peta Kriteria Evaluasi	78
3.2.	Bobot Kriteria Evaluasi	80
3.3.	Kelas Kesesuaian Lokasi	81
D.	Strategi Pengembangan Ekowisata Lanskap Desa Bulue	86
1.	Karakteristik Lanskap.....	86
2.	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat.....	87
3.	Prioritas Perencanaan.....	87
4.	Rumusan Strategi	92
BAB V	101
KESIMPULAN DAN SARAN	101
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN 1	107
LAMPIRAN 2	110
LAMPIRAN 3	119
LAMPIRAN 4	121
LAMPIRAN 5	125
LAMPIRAN 6	126



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 2 Lokasi Penelitian di Desa Bulue, Kabupaten Soppeng	32
Gambar 3 Diagram Alur Penelitian	53
Gambar 4 Tutupan Lahan Desa Bulue, Kabupaten Soppeng	68
Gambar 5 Sebaran Potensi Wisata Alam Lanskap Desa Bulue, Kabupaten Soppeng.....	76
Gambar 6 Aktivitas Pemanenan Madu Hutan	77
Gambar 7 Delapan Peta Kriteria Evaluasi Kesesuaian Ekowisata di Desa Bulue, Soppeng	79
Gambar 8 Peta Kelas Kesesuaian Lokasi untuk Pengembangan Ekowisata.....	82
Gambar 9 Tapak Pengembangan Ekowisata pada Lanskap Desa Bulue, Kabupaten Soppeng	84
Gambar 10 Model Pengelolaan Sampah Aktivitas Wisata (Vitasurya,2014)	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Ekowisata dengan Wisata Masal (Kiper, 2013)	13
Tabel 2 Skala Perbandingan (Hartono et al., 2018)	21
Tabel 3 Contoh Kuesioner AHP (Hartono et al., 2018)	22
Tabel 4 Rangkuman Kriteria-Kriteria Terpilih dan Skala Evaluasinya (Bunruamkaew & Murayama, 2011; Liaghat et al., 2013; Dhami et al., 2014; Mobaraki et al., 2014; Mohd & Ujang, 2016; Rahayuningsih, Muntasib, & Budi, 2016; Fernando & Shariff, 2017; Sadikin et al., 2017).....	24
Tabel 5 Jumlah dan Cara Pemilihan Sampel.....	34
Tabel 6 Substansi Kuesioner dan Responden	36
Tabel 7 Kuesioner Keindahan Potensi Wisata	37
Tabel 8 Kriteria dan Skala Evaluasi (Bunruamkaew & Murayama (2011) dengan modifikasi dari berbagai sumber)	40
Tabel 9 Kuesioner Pembobotan Kriteria Evaluasi (skala 1 = sama penting; 2 = sedikit lebih penting; 3 = lebih penting; 4 = sangat lebih penting; 5 = mutlak lebih penting)(Hartono et al., 2018).....	42
Tabel 10 Kuesioner Pembobotan Sub-kriteria Aksesibilitas (skala 1 = sama penting; 2 = sedikit lebih penting; 3 = lebih penting; 4 = sangat lebih penting; 5 = mutlak lebih penting) (Hartono et al., 2018).....	42
Tabel 11 Kuesioner Pembobotan Sub-kriteria <i>Naturalness</i> (skala 1 = sama penting; 2 = sedikit lebih penting; 3 = lebih penting; 4 = sangat lebih penting; 5 = mutlak lebih penting) (Hartono et al., 2018)..	42
Tabel 12 Skala Penilaian Faktor Pendorong (Aliyah, 2003).....	44
Tabel 13 Skala Penilaian Faktor Penghambat (Aliyah, 2003).....	44
Tabel 14 Keterkaitan Rencana Pengembangan Wisata (RPJMD Kab.Soppeng 2016 - 2021; RTRW Kab.Soppeng 2012 - 2032; RENSTRA Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	



Kab.Soppeng 2016 – 2021; RPHJP KPHL Unit XII Walanae Periode 2019 – 2028; Revisi RP TWA Lejja Periode 1998 - 2023, Penataan Blok TWA Lejja; RPPA Perusda Kabupaten Soppeng)	55
Tabel 15 Jenis Kelamin Responden Pelaku Wisata TWA Lejja	61
Tabel 16 Domisili Responden Pelaku Wisata TWA Lejja	61
Tabel 17 Tingkat Pendidikan Responden Pelaku Wisata TWA Lejja	61
Tabel 18 Umur Responden Pelaku Wisata TWA Lejja	61
Tabel 19 Aktivitas Kunjungan Wisata di TWA Lejja, Kabupaten Soppeng	62
Tabel 20 Tingkat Kesukaan Pengunjung terhadap Berbagai Aktivitas Wisata di TWA Lejja, Kabupaten Soppeng	63
Tabel 21 Tingkat Keberlanjutan Destinasi Wisata Alam Lejja, Desa Bulue, Kabupaten Soppeng	64
Tabel 22 Tutupan Lahan Desa Bulue, Kabupaten Soppeng	67
Tabel 23 Potensi Wisata Alam Lanskap Desa Bulue, Kabupaten Soppeng	71
Tabel 24 Nilai Estimasi Keindahan Potensi Wisata Alam Lanskap Desa Bulue, Kabupaten Soppeng	78
Tabel 25 Bobot Kriteria Evaluasi	80
Tabel 26. Deskripsi Tapak Pengembangan Ekowisata pada Lanskap Desa Bulue, Kabupaten Soppeng	85
Tabel 27 Karakteristik Lanskap Desa Bulue untuk Pengembangan Ekowisata	86
Tabel 28 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengembangan Ekowisata Lanskap Desa Bulue	87
Tabel 29 Bobot Nilai Faktor Pendorong	88
Tabel 30 Bobot Nilai Faktor Penghambat	89
Tabel 31 Prioritas Perencanaan Pengembangan Ekowisata Lanskap Desa Bulue	91
Tabel 32 Strategi Pengembangan Ekowisata Lanskap Desa Bulue	92



DAFTAR PERSAMAAN

Persamaan 1 Slovin (Jubilee Enterprise, 2018).....	33
Persamaan 2 Nilai penduga estetika foto ke-x.....	46
Persamaan 3 Consistency Ratio (CR)	47
Persamaan 4 Total nilai kesesuaian masing-masing unit lokasi	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) mempunyai definisi bahwa kegiatan pariwisata telah berada pada tingkat yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang karena menghasilkan manfaat bersih untuk lingkungan sosial, ekonomi, alam, dan budaya (Stoddard, Pollard, & Evans, 2012). Sementara *World Tourism Organization* (WTO, 2004) menekankan bahwa *sustainable tourism* harus : (1) memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan; (2) menghormati keaslian sosio-budaya komunitas lokal; dan (3) memberikan manfaat sosio-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara adil. Ekowisata erat hubungannya dengan *sustainable tourism* (Bunruamkaew & Murayama, 2011; Kiper, 2013). *The International Ecotourism Society* mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan bertanggung jawab ke area alami yang melestarikan lingkungan, mempertahankan kesejahteraan masyarakat setempat, dan melibatkan interpretasi serta pendidikan (Ecotourism.org, 2019).

Terdapat perbedaan karakteristik antara ekowisata dengan wisata masal. Wisata masal dipandang sebagai bentuk pengembangan wisata yang lebih tradisional dan jangka pendek, prinsip-prinsip pasar bebas mendominasi dan maksimalisasi pendapatan sangat penting (Kiper, 2013).



Pengembangan pariwisata yang cenderung bersifat masal dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial budaya (Akis, 2011 ; Sayeda, 2017). Sedangkan pengembangan ekowisata memiliki dampak minimal terhadap ekosistem; berkontribusi secara ekonomi kepada masyarakat lokal; menghormati budaya lokal; dikembangkan menggunakan proses partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan; dan dimonitor untuk mendeteksi dampak negatif dan positif (Drumm & Moore, 2005).

Desa Bulue yang terletak di kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng memiliki lanskap yang bervariasi, topografinya berbukit-bukit dengan ketinggian wilayah 80 – 920 m di atas permukaan laut (BPS Kab.Soppeng, 2018). Desa Bulue mempunyai potensi wisata lokal berupa pemandian air panas yang terletak di dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja (Pemerintah Desa Bulue, 2019). TWA Lejja ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 169/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 dengan luas 1.318 hektar. TWA Lejja mempunyai potensi sumber air panas yang tidak bau belerang, bersih dan jernih dengan debit air relatif besar sepanjang tahun. Pada tahun 2018 pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pungutan karcis masuk TWA Lejja mencapai Rp 559.613.500,- (BBKSDA Sulsel, 2019c).

Karakteristik wisatawan yang berkunjung ke TWA Lejja tergolong muda, yaitu berumur antara 13 – 25 tahun (Perusda Kab.Soppeng, 2019).



Selama kurun waktu tahun 2014 – 2018, terjadi kecenderungan penurunan jumlah wisatawan namun dapat dikatakan tidak signifikan. Pada tahun 2014 sebanyak 108.553 wisatawan, tahun 2015 sebanyak 113.629 wisatawan, tahun 2016 sebanyak 90.787 wisatawan, tahun 2017 sebanyak 101.342 wisatawan dan pada tahun 2018 sebanyak 90.225 wisatawan (BBKSDA Sulsel, 2019a). Pada musim liburan terjadi lonjakan jumlah wisatawan. Tahun 2017, puncak kunjungan terjadi pada bulan Juli sebanyak 31.401 wisatawan. Sementara pada tahun 2018, puncak kunjungan terjadi pada bulan Juni sebanyak 22.240 wisatawan (BBKSDA Sulsel, 2019b).

Terdapat rencana pengembangan wisata pada TWA Lejja, yaitu area seluas 50 hektar di dalam blok pemanfaatan akan dikelola oleh perusahaan daerah (Perusda) Kabupaten Soppeng melalui mekanisme Ijin Usaha Pengusahaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) selama jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun 2020 - 2075. Konsep pengembangannya menggunakan *branding* “*Lejja Hot Spring Healing Resort*” dengan menata area 50 hektar menjadi 4 (empat) *cluster* wisata: (1) *cluster* umum (merupakan area wisata pemandian air panas saat ini); (2) *cluster* semi privat; (3) *cluster* VVIP; dan (4) *cluster high-tech water park* (Perusda Kab.Soppeng, 2019).

Berdasarkan hasil pengamatan awal, aktivitas wisata di TWA Lejja cenderung bersifat masal dan berpotensi memberikan dampak negatif bagi lingkungan seperti penumpukan sampah, kepadatan dan kebisingan kendaraan saat musim liburan. Selain dampak lingkungan, dampak



ekonomi dan sosial budaya dari aktivitas wisata di TWA Lejja belum banyak diketahui. Menurut Weber & Taufer (2016), keseimbangan ketiga aspek sustainability tersebut merupakan dasar bagi keberhasilan pengembangan kawasan wisata.

Di sisi lain, kawasan di sekitar TWA Lejja yang merupakan daerah penyangga dalam batas wilayah Desa Bulue sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit XII Walanae dengan potensi jasa lingkungan dan wisata alam yang belum dikembangkan (Dishut Prov.Sulsel, 2018). Sedangkan pemandian air panas TWA Lejja telah berkembang sebagai destinasi wisata alam dibawah pengelolaan Perusda Soppeng.

Masyarakat Desa Bulue yang bermukim di sekitar TWA Lejja dan hutan lindung sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, peladang dan pekebun sehingga potensi perambahan untuk perladangan dan perkebunan sangat besar dan cenderung bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk. Kondisi kawasan hutan yang relatif kritis akibat perambahan oleh masyarakat dapat mengurangi nilai keindahan alam sehingga diperlukan upaya rehabilitasi dan sistem pengelolaan hutan yang mendukung tujuan wisata sekaligus menciptakan pendapatan bagi masyarakat (Dishut Prov.Sulsel, 2018). Selain itu, kawasan hutan yang berdekatan dengan lahan milik masyarakat berpotensi terjadi konflik tenurial. Terhadap permasalahan ini, KPHL Unit XII Walanae telah menyusun strategi pengelolaan berupa sosialisasi batas kawasan hutan



kepada masyarakat sekitar hutan serta melakukan pembinaan kelompok tani dan masyarakat sekitar hutan dalam pengembangan potensi jasa lingkungan dan wisata alam.

Dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Soppeng, kawasan TWA Lejja dan kawasan hutan lindung sekitarnya dalam wilayah Desa Bulue telah ditetapkan sebagai kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Soppeng dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sekaligus kawasan TWA Lejja sebagai kawasan wisata alam (PERDA Kab Soppeng No 8 Tahun 2012). Kawasan TWA Lejja dan daerah penyangga merupakan hulu sungai Batu-batu yang mengalir ke Danau Tempe. Menurut Marjuki (2016), penyusutan luas efektif Danau Tempe disebabkan oleh erosi tinggi di daerah hulu yang menyebabkan aliran sedimen menuju danau yang masif di setiap musim penghujan. Erosi yang tinggi di daerah hulu sungai ini disebabkan oleh konversi lahan yang luas dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya perkebunan lahan kering. Meskipun telah ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten, belum terdapat rencana pengembangan potensi wisata di daerah penyangga yang terintegrasi dengan kawasan TWA Lejja yang diharapkan dapat menciptakan peluang pendapatan bagi masyarakat.

Sebagai KSK Soppeng, pemanfaatan kawasan TWA Lejja dan daerah penyangga harus sejalan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan. Sehingga dalam hal pengembangan wisata diperlukan keterpaduan antara rencana pengembangan TWA Lejja dan



pengembangan daerah penyangga dengan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng secara keseluruhan.

Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, pada lanskap Desa Bulue masih terdapat permasalahan antara lain: belum adanya sinergi pengembangan potensi wisata alam lanskap Desa Bulue sebagai KSK, adanya aktivitas wisata alam cenderung bersifat masal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan adanya potensi kerusakan keindahan lanskap Desa Bulue oleh aktivitas mata pencaharian masyarakat daerah penyangga. Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan strategi yang mampu mendorong pengembangan ekowisata melalui pendekatan lanskap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, guna merumuskan strategi pengembangan ekowisata, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan antara rencana pengembangan wisata alam TWA Lejja dan daerah penyangga (lanskap Desa Bulue) dengan pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana persepsi pelaku wisata terhadap tingkat keberlanjutan wisata alam TWA Lejja?
3. Bagaimana kesesuaian lanskap Desa Bulue untuk ekowisata?
4. Apa strategi yang dapat dirumuskan untuk pengembangan ekowisata Desa Bulue melalui pendekatan lanskap?



C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji keterkaitan antara rencana pengembangan wisata alam TWA Lejja dan daerah penyangga (lanskap Desa Bulue) dengan pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng.
2. Mengkaji persepsi pelaku wisata terhadap tingkat keberlanjutan wisata alam TWA Lejja.
3. Mengkaji kesesuaian lanskap Desa Bulue untuk ekowisata.
4. Merumuskan strategi pengembangan ekowisata Desa Bulue melalui pendekatan lanskap.

D. Manfaat Penelitian

Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan menjadi model dalam pengembangan ekowisata. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi arahan bagi pengelola TWA Lejja, daerah penyangga, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan wisata alam yang berkelanjutan.

E. Ruang Lingkup

Cakupan wilayah penelitian ini adalah lanskap Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemanfaatan Taman Wisata Alam

Taman Wisata Alam (TWA) adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam (UU No 5 Tahun 1990; PP No 28 Tahun 2011). TWA dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: (1) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; (2) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; (3) pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam; (4) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; (5) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan (6) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. Pengelolaan TWA dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas blok pemanfaatan TWA dengan mengikursertakan masyarakat.

B. Pengelolaan Daerah Penyangga

Daerah penyangga (*buffer zone*) adalah wilayah yang berbatasan atau diluar KSA (Kawasan Suaka Alam meliputi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) atau KPA (Kawasan Pelestarian Alam meliputi Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam), baik sebagai



kawasan hutan lain (kawasan hutan lindung, hutan produksi, serta hutan hak), tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan KSA atau KPA (UU No 5 Tahun 1990; PP No 28 Tahun 2011). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menetapkan dan mengelola wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai daerah penyangga.

Rencana pengelolaan daerah penyangga mengacu kepada rencana pengelolaan KSA dan KPA yang bersangkutan dan rencana pembangunan daerah. Pengelolaan daerah penyangga salah satunya melalui pembinaan fungsi daerah penyangga yang meliputi: (1) peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya; (2) peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan (3) peningkatan produktivitas lahan.

Daerah penyangga memberikan manfaat baik secara biologi, sosial, ekonomi, institusional dan kebijakan (Ebregt & Greve, 2000). **Secara biologi**, menyediakan perlindungan ekstra melawan kerusakan akibat badai, kekeringan, erosi dan bentuk-bentuk kerusakan lainnya. **Secara sosial**: meningkatkan potensi penghasilan dan kualitas lingkungan masyarakat lokal, melindungi hak atas lahan tradisional dan budaya masyarakat lokal. **Secara ekonomi**, meningkatkan keuntungan dari pemanfaatan langsung kawasan konservasi berupa pendapatan dari wisatawan, para peneliti dan peluang lapangan kerja. **Secara institusi dan kebijakan**, meningkatkan



tanggung jawab pemerintah lokal untuk melibatkan komponen-komponen konservasi dalam perencanaan wilayah dan implementasinya.

C. Lanskap dan Pendekatan Lanskap

Lanskap merupakan cakupan bentang alam yang terdiri atas elemen fisik, biotis dan hasil budidaya manusia (Fandeli & Muhammad, 2009) serta dimensi historis dan budaya (Janic & Sestras, 2019). Definisi lain lanskap adalah sebuah area yang heterogen yang terbentuk dari berbagai tipe ekosistem yang saling berinteraksi (Prasetyo, 2017). Selanjutnya, struktur lanskap dibedakan menjadi *patch* (fragmen), *matrix* (matriks) dan *corridor* (koridor). Fragmen adalah area homogen yang dapat dibedakan dari daerah di sekitarnya, matriks adalah fragmen yang dominan sedangkan koridor adalah fragmen yang berbentuk memanjang. Batas antara fragmen yang berbeda atau antara fragmen dan matriks disebut *edge*/tepi.

Menurut Groot, *et al.* (2002) dalam (Prasetyo, 2017), fungsi lanskap berkaitan dengan barang dan jasa lingkungan yang disediakan oleh lanskap yang meliputi fungsi produksi (pangan, sandang, papan, energi), habitat (tempat hidup biodiversitas), regulator (berbagai siklus di biosfer dan atmosfer) dan informasi (keindahan/rekreasi/kultural). Pendekatan lanskap merupakan pendekatan yang mengakomodasikan berbagai kepentingan terkait dengan penggunaan lahan yang saling bertentangan, yaitu antara fungsi ekonomi yang ekstraktif dan jasa lingkungan yang konservatif.

D. Ekowisata

Definisi ekowisata pertama kali disampaikan oleh *The International Ecotourism Society* (1990) dalam (Drumm & Moore, 2005; Fandeli, 2002; Kiper, 2013). Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan ke kawasan yang masih alami dengan tujuan mengkonservasi lingkungan, melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Kemudian pada tahun 1996, *World Conservation Union* (IUCN) memberikan definisi ekowisata sebagai perjalanan dan kunjungan yang bertanggung jawab secara lingkungan ke daerah-daerah alami, untuk menikmati dan menghargai alam (dan setiap fitur budaya yang menyertainya, baik dulu maupun sekarang) yang mempromosikan konservasi, memiliki dampak pengunjung yang rendah dan memberikan keterlibatan sosial ekonomi yang aktif dan menguntungkan dari masyarakat setempat (Drumm & Moore, 2005; Kiper, 2013).

Dalam perkembangannya, ekowisata dipandang dapat menciptakan industri pariwisata. Ekowisata telah muncul sebagai *platform* untuk membangun kemitraan di antara konservasionis, komunitas dan pelaku wisata untuk bersama-sama mengelola obyek daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengalami dan belajar tentang area alami dan beragam budaya. Standar ekowisata menurut Weaver & Lawton (2007) dalam (Kiper, 2013) meliputi:

1. Perlindungan ekosistem
 - a. Pemeliharaan ekosistem tempat atraksi ekowisata berada



- b. Perlindungan dan pemeliharaan satwa liar terutama spesies yang terancam punah
- c. Satwa liar hidup harmonis dengan manusia
2. Pemeliharaan kondisi fisik kimia kawasan
 - a. Pemeliharaan kualitas air tawar dan sumber daya laut
 - b. Tidak ada limbah yang meluap dan kontaminasi lingkungan (air, tanah dan udara)
3. Konservasi budaya dan sejarah lokal
 - a. Budaya lokalitas dipertahankan
 - b. Struktur sejarah dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya
4. Infrastruktur dan papan informasi menyatu dengan lingkungan
5. Keberlanjutan
 - a. Pemeliharaan daya dukung lingkungan
 - b. Program pendidikan lingkungan adalah bagian dari paket ekowisata
 - c. Mata pencaharian harus lebih menguntungkan komunitas lokal daripada pengusaha luar
 - d. Pemerintah daerah mendukung proyek ekowisata melalui peraturan dan resolusi
 - e. Manajemen pengelola (berbasis masyarakat) dan lembaga pemerintah yang kredibel
 - f. Pengalaman dan manajemen produk harus mengikuti prinsip dan praktik yang terkait dengan keberlanjutan ekologis, sosial-budaya dan ekonomi



Terdapat perbedaan karakteristik antara ekowisata dengan pariwisata masal. Pariwisata masal dipandang sebagai bentuk pengembangan pariwisata yang lebih tradisional dan jangka pendek, prinsip-prinsip pasar bebas mendominasi dan maksimalisasi pendapatan sangat penting.

Tabel 1 Perbedaan Ekowisata dengan Wisata Masal (Kiper, 2013)

Wisata Masal	Ekowisata
Pengunjung dalam kelompok yang besar	Pengunjung dalam kelompok yang kecil
Perkotaan	Pedesaan
Pemasaran wisata pada umumnya	Pemasaran yang ramah lingkungan
Harga rata-rata untuk tujuan pengunjung sebanyak-banyaknya	Harga tinggi dengan tujuan menyaring pasar
Dampak pada lingkungan alam	Dampak kecil pada lingkungan alam
Perlu kontrol lebih	Kontrol terbatas
Manajemen berbasis ekonomi makro	Manajemen berbasis ekonomi lokal
Hubungan yang bersifat umum antara pengunjung dan komunitas lokal	Hubungan yang bersifat personal antara pengunjung dan komunitas lokal
Tujuan pembangunan secara umum	Tujuan pembangunan yang bersifat lokal
Aktivitas wisata yang berorientasi pada perilaku wisatawan	Perilaku wisata yang sesuai untuk lingkungan alam
Pengembangan fasilitas pariwisata secara intensif	Mengurangi pengembangan fasilitas pariwisata

E. Persepsi Pelaku Wisata

Menurut Siagian (1995) dalam Siswantoro (2012), persepsi merupakan suatu proses yang mana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorinya dalam usahanya memberikan suatu makna tertentu pada lingkungannya. Sedangkan menurut Walgito (2003) dalam Sayangbatti & Baiquni (2013), persepsi sebagai sebuah proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap



stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu. Dalam membentuk suatu persepsi, seluruh potensi yang terdapat dalam diri individu terlibat secara aktif baik yang berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, preferensi, sikap, dan lain sebagainya.

Dalam hal pengembangan wisata baru, persepsi para pelaku (pengelola, wisatawan, pemerintah, swasta dan masyarakat) sangatlah penting. Persepsi masyarakat merupakan pandangan yang akan mengarahkan respek masyarakat dalam menanggapi fenomena yang ada di sekitarnya. Masyarakat harus dilibatkan dan diperhatikan persepsinya dalam pengelolaan lingkungan. Karena itulah persepsi merupakan elemen mendasar yang perlu diketahui sebelum merencanakan kegiatan yang akan melibatkan masyarakat setempat (Mahbub et al., 2018).

Wawancara adalah metoda yang digunakan untuk mencari data primer dan merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam penelitian interpretif ataupun kritis (Hartono et al., 2018). Maksud penggunaan metode wawancara adalah ketika peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman responden terhadap fenomena sosial. Dalam wawancara terstruktur dengan analisis kuantitatif data numerik sangatlah penting. Responden akan merespon jawaban yang telah disediakan dengan memilih satu opsi dari serangkaian pilihan yang telah ditentukan.



Siswantoro (2012) telah melakukan kajian persepsi pelaku wisata Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Karanganyar. Kajian yang dilakukan meliputi karakteristik pelaku wisata, informasi obyek wisata, persepsi terhadap konservasi dan lingkungan, aktivitas wisata dan pengelolaan obyek wisata. Hasil kajian menunjukkan bahwa responden wisatawan umumnya berpendidikan menengah atas (81%). Wisatawan umumnya peduli terhadap permasalahan konservasi dan lingkungan (60%). Wisatawan ternyata menyukai aktivitas menikmati pemandangan (90%) dan relaksasi (80%). Wisatawan menyatakan bahwa telah mendapatkan kepuasan dalam berwisata (95%) dan ingin kembali berwisata di TWA (92%).

Sementara Mahbub et al. (2018) telah melakukan kajian terkait persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan ekowisata karst di Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dengan hasil bahwa persepsi masyarakat Desa Sambueja adalah persepsi positif terhadap rencana pengembangan ekowisata karst. Mayoritas masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak keberatan jika desa Sambueja dibangun dan dikembangkan sebagai desa ekowisata, tetapi mengharuskan pengembangan dan pengembangannya harus mengacu pada konsep pariwisata yang mempertimbangkan pelestarian fungsi lingkungan, potensi ekologis dan mempertahankan nilai-nilai budaya di masyarakat setempat.

F. Sustainability Destinasi Wisata

Dalam rangka meningkatkan sustainability pengelolaan wisata, telah dikembangkan *framework* sebagai tolak ukur dalam pengembangan wisata yang berkelanjutan yaitu *Triple Bottom Line* (TBL) yang meliputi 3 dimensi: ekonomi, sosial dan lingkungan (Stoddard *et al.*, 2012). Keseimbangan antara tiga dimensi sustainability membentuk dasar bagi keberhasilan pengembangan kawasan pariwisata. Pengembangan produk berkelanjutan sangat penting untuk tujuan menciptakan pengalaman berkelanjutan yang nyata bagi para pengunjung. Namun demikian, penilaian sustainability menggunakan TBL terdapat beberapa tantangan seperti pengetahuan evaluator, variasi produk wisata, dan perbedaan antar destinasi wisata.

Terdapat sejumlah standar, skema sertifikasi dan label, agar supaya sustainability dapat diukur dan dipahami melalui penggunaan indikator. Berdasarkan sistem yang ada dan dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik produk pariwisata, 12 kriteria sustainability telah ditetapkan dalam empat bidang, yaitu manajemen, ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan (Weber & Taufer, 2016).

1. Manajemen

- a. Manajemen keberlanjutan: produk wisata dimonitoring dan dievaluasi secara teratur; efek yang ditimbulkan diukur dan langkah-langkah perbaikan dilakukan.

- b. Partisipasi pemangku kepentingan: terjadi pertukaran aktif dengan semua pemangku kepentingan yang secara langsung (pedagang, pengunjung) atau tidak langsung (masyarakat sekitar, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat); harapan dan kebutuhan yang berbeda dipertimbangkan ketika mengembangkan produk.
- c. Menginformasikan para tamu tentang keberlanjutan: para tamu diinformasikan tentang aspek keberlanjutan dan didorong untuk berkontribusi; semua karyawan dilatih sehingga mereka dapat menginformasikan tamu secara kompeten.

2. Ekonomi

- a. Penguatan ekonomi wilayah: sedapat mungkin produk tersebut mencakup produk lokal dan wilayah sekitar dan mendukung penyedia layanan lokal. Sumber daya dan daya tarik daerah dipromosikan.
- b. Manfaat pelanggan khusus: produk wisata memberikan pengalaman pelanggan yang menarik; memiliki kualitas tinggi, keunikan, konten inovasi dan / atau referensi eksplisit ke wilayah produk menghasilkan manfaat pelanggan yang tinggi sehingga meningkatkan daya saing.
- c. Efisiensi ekonomi: biaya pengembangan dan pemeliharaan produk dalam hubungan positif dengan efek ekonomi yang dimaksud; produk menghasilkan nilai tambah (langsung atau

tidak langsung) dan / atau meningkatkan daya tarik bagi para tamu.

3. Sosial-Budaya

- a. Pertimbangan kebutuhan tamu spesifik: produk mempertimbangkan tamu dengan kebutuhan spesifik (mis. aksesibilitas, keramahan keluarga, keramahan senior, intoleransi makanan, dll.). Informasi yang sesuai tersedia secara transparan.
- b. Kondisi kerja untuk karyawan: Kondisi kerja untuk karyawan adil dan menarik (mis. gaji yang sama, keselamatan, kesehatan, pendidikan dan pelatihan, keseimbangan kehidupan kerja, promosi keanekaragaman dalam hal budaya, usia, jenis kelamin, dll.).
- c. Promosi budaya lokal: budaya lokal dibudidayakan dan dipromosikan (mis. adat istiadat, bahan atau arsitektur daerah). produk ini berkontribusi pada pelestarian dan peningkatan budaya daerah. Itu asli dan sesuai dengan budaya lokal. Pertukaran antara pengunjung dan penduduk setempat sangat dianjurkan.

4. Lingkungan Hidup

- a. Kesadaran penghematan energi: ada penghematan penggunaan energi secara sadar (mis. efisiensi energi dan energi terbarukan) serta langkah-langkah untuk menghemat energi untuk menghindari emisi CO₂.

- b. Mobilitas ramah lingkungan: ada penawaran untuk mobilitas ramah lingkungan yang dikomunikasikan secara aktif (mis. informasi tamu, layanan penjemputan); ada insentif untuk para tamu; dalam kasus terbaik, produk hanya mencakup sarana transportasi yang ramah lingkungan.
- c. Perlindungan sumber daya alam, bentang alam dan lingkungan: penggunaan sumber daya alam, bentang alam, dan lingkungan lainnya yang bertanggung jawab (mis. konsumsi lahan rendah, keanekaragaman hayati). Konservasi, restorasi dan peningkatan lanskap alam dan budaya didukung secara langsung atau tidak langsung; pembangunan fasilitas (pensinyalan, panel, infrastruktur, dll.) mempertimbangkan lingkungan alam, pemandangan, dan arsitektur. Ada langkah-langkah untuk mengurangi polusi suara, perlindungan air dan konservasi dan untuk pencegahan, pengurangan, pemisahan dan daur ulang dan pembuangan limbah.

Penelitian terkait sustainabilitas wisata telah dilakukan di beberapa tempat. Di Pulau Mentawai telah dilakukan penelitian terkait persepsi operator wisata *surfing* (operator *boat* carteran dan operator *resort*) terhadap perkembangan wisata berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi terstruktur (Towner & Orams, 2016). Hasilnya menunjukkan operator *resort* berpendapat wisata *surfing* di Pulau Mentawai bersifat *sustainable* sedangkan operator *boat*



carteran berpendapat *unsustainable*. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa operator merasa wisata *surfing* telah secara dramatis mengubah desa tradisional Mentawai dan menghasilkan dampak sosial-budaya yang merugikan bagi masyarakat setempat.

Di Kuba, penilaian terhadap tingkat sustainabilitas destinasi wisata berdasarkan persepsi stakeholder juga telah dilakukan pada 15 destinasi wisata alam menggunakan indikator sosial, ekonomi dan patrimonial (Pérez et al., 2017). Metode yang digunakan dengan pemberian skor pada masing-masing indikator menggunakan skala likert (1 - 5), kemudian pembobotan masing-masing indikator menggunakan metode pengambilan keputusan multi kriteria untuk menentukan *suitability index* (SI). Tingkat sustainabilitas 15 destinasi wisata ditentukan berdasarkan hasil agregasi skor dan SI masing-masing indikator

G. Analisis Multi-kriteria untuk Kesesuaian Ekowisata

Analytical Hierarchy Process (AHP) menurut Saaty (2008) dalam Mobaraki et al. (2014) adalah teknik terstruktur untuk mengatur dan menganalisis keputusan yang kompleks berdasarkan matematika dan psikologi. Tidak hanya menetapkan keputusan yang mendekati kebenaran, AHP juga mengarahkan pengambil keputusan menemukan yang paling sesuai dengan tujuan dan pemahaman mereka tentang masalah yang akan diselesaikan. Esensi AHP menurut Saaty (2008) dalam Mobaraki et al.



(2014) adalah penilaian manusia, bukan hanya informasi yang mendasarinya, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan evaluasi.

Analytical Hierarchy Process mengubah informasi ke nilai numerik yang dapat diproses dan dibandingkan pada seluruh rentang masalah. Kuesioner didesain untuk bisa mengakomodir penilaian perbandingan berpasangan dari setiap informasi. Nilai numerik dibutuhkan untuk pemeringkat. Menurut Saaty (2008) dalam (Hartono et al., 2018) skala 1 sampai dengan 9 adalah skala terbaik dalam mengepresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dan skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Skala Perbandingan (Hartono et al., 2018)

Tingkat Kepentingan	Definisi Variabel	Penjelasan
1	Kedua elemen sama penting	Kedua elemen memberikan pengaruh sama penting
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dibandingkan dengan elemen lainnya	Pengalaman dan pertimbangan sedikit memihak elemen satu dibandingkan yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih esensial atau sangat penting dari elemen lainnya	Pengalaman dan penilaian dengan kuat memihak elemen satu dibandingkan yang lainnya
7	Elemen yang satu jelas penting dibandingkan dengan elemen lainnya	Elemen yang satu dengan kuat disukai dan dominasinya tampak nyata dalam praktek
9	Satu elemen mutlak lebih penting dibandingkan elemen yang lain	Bukti yang memihak elemen yang satu atas yang lain berada pada tingkat persetujuan tertinggi yang mungkin
2,4,6,8	Nilai-nilai tengah diantara penilaian yang berdekatan	Diperlukan kompromi antara dua pertimbangan
Kebalikan dari nilai diatas	Jika untuk nilai aktivitas i mendapatkan satu angka bila dibandingkan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i.	



Menurut Hartono et al. (2018), kuesioner AHP dibuat sedikit berbeda dengan kuesioner pada umumnya. Kuesioner AHP didesain dengan sistem penilaian perbandingan relatif antar variabel. Skala perbandingan idealnya berupa kategori penilaian ganjil, misalkan antara nilai 1 sampai 3, 1 sampai 5, 1 sampai 7, atau 1 sampai 9. Contoh pembuatan kuesioner AHP dengan hanya menggunakan skala 1 sampai 5 seperti tampak pada Tabel 3.

Pada Tabel 3, angka numerik 1 berada di tengah-tengah sebagai isyarat bahwa kondisi dari kedua variabel yang dibandingkan adalah sama bobot nilainya secara relatif. Sedangkan angka 2,3,4 dan 5 di sebelah kanan maupun kiri angka 1 adalah berbobot sama. Dipilih arah ke kiri apabila kriteria sebelah kiri lebih penting dari pada kriteria di sebelah kanan, demikian juga berlaku sebaliknya.

Tabel 3 Contoh Kuesioner AHP (Hartono et al., 2018)

Variabel	5	4	3	2	1	2	3	4	5	Variabel
Kriteria 1										Kriteria 2
Kriteria 1										Kriteria 3
Kriteria 2										Kriteria 3

Keterangan : skala 1 = sama penting; 2 = sedikit lebih penting; 3 = lebih penting; 4 = sangat lebih penting; 5 = mutlak lebih penting

Integrasi antara AHP dan *Geographic Information System* (GIS) atau disebut disebut *Multicriteria Decision Analysis* sangat penting dalam menentukan bobot relatif kriteria yang digunakan dalam evaluasi kesesuaian ekowisata. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa integrasi AHP dan GIS sangat kuat untuk perencanaan pariwisata yang



dapat secara efektif membantu dalam pengembangan ekowisata (Bunruamkaew & Murayama, 2011; Mohd & Ujang, 2016). Langkah-langkah evaluasi kesesuaian ekowisata dengan mengintegrasikan GIS dan AHP adalah sebagai berikut (Wu et al., 2015):

1. Mengumpulkan data kuesioner AHP hasil penilaian responden dan membuat matriks perbandingan;
2. Memeriksa konsistensi matriks perbandingan dan menghitung bobot dari masing-masing kriteria evaluasi menggunakan *software*;
3. Mengelompokkan lanskap menjadi unit-unit lahan menggunakan analisis perangkat lunak GIS (setiap unit lahan dianggap sebagai unit evaluasi tata ruang dasar); dan
4. Menghitung nilai individu untuk masing-masing kriteria evaluasi, menetapkan bobot sesuai dengan matriks penilaian kuesioner dan merangkum bobot untuk mendapatkan hasil kesesuaian komprehensif untuk setiap unit lahan.

Penggunaan *multi-criteria decision analysis* sebagai metode evaluasi kesesuaian ekowisata telah banyak dilakukan. Bunruamkaew & Murayama (2011) menggunakan kriteria evaluasi berupa: *land use/cover, visibility, elevation, slope, proximity to cultural sites, distance from roads, settlement size, protection area* dan *species diversity*. Liaghat et al. (2013), menggunakan kriteria evaluasi yang berupa: jarak, kelerengan dan tipe penggunaan lahan. Dhami et al. (2014), menggunakan kriteria evaluasi berupa: jarak, kelerengan, keragaman flora dan fauna dan *remoteness*.



Mobaraki et al. (2014), menggunakan kriteria evaluasi berupa: akses, hidrologi, iklim, topology, tutupan lahan dan geologi. Sementara Mohd & Ujang (2016), menjelaskan kriteria-kriteria yang digunakan dalam kerangka kerja penilaian kesesuaian lahan untuk ekowisata berupa: kelerengan, ketinggian, iklim, tanah, tutupan lahan. Fernando & Shariff (2017), menggunakan kriteria evaluasi berupa: keanekaragaman hayati, sumber air, kelerengan, tutupan dan penggunaan lahan, jaringan jalan dan pemukiman.

Rangkuman kriteria-kriteria terpilih dan skala evaluasi yang digunakan dalam evaluasi kesesuaian ekowisata berdasarkan penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Rangkuman Kriteria-Kriteria Terpilih dan Skala Evaluasinya (Bunruamkaew & Murayama, 2011; Liaghat et al., 2013; Dhami et al., 2014; Mobaraki et al., 2014; Mohd & Ujang, 2016; Rahayuningsih, Muntasib, & Budi, 2016; Fernando & Shariff, 2017; Sadikin et al., 2017)

Kriteria	Sub Kriteria	Skala Evaluasi
Slope	-	Semakin kecil derajat kemiringan lahan, semakin sesuai
Aksesibilitas	Jarak dari situs wisata unggulan	Semakin dekat jarak dari situs wisata unggulan, semakin sesuai
	Jarak dari jalan	Semakin baik kualitas dan jarak dari jalan, semakin sesuai
Naturalness	Tutupan lahan	Semakin besar tutupan hutan primer, semakin sesuai
	Jarak dari pemukiman	Semakin dekat dari pemukiman, semakin tidak sesuai
	Status kawasan	Semakin tinggi status perlindungan kawasan, semakin sesuai
Hidrologi	-	Semakin dekat dengan sumber air, semakin sesuai
Potensi Wisata	-	Semakin dekat dengan spot potensi wisata alam, semakin sesuai



H. Estimasi Keindahan Pemandangan

Konseptualisasi keindahan pemandangan didasarkan pada premis bahwa keindahan adalah konsep “interaktif”. Keindahan pemandangan tidak sepenuhnya “di mata yang melihatnya” juga bukan semata-mata properti lanskap. Sebaliknya, keindahan pemandangan disimpulkan dari penilaian yang dibuat oleh pengamat manusia dalam menanggapi persepsinya tentang lanskap. Seorang pengamat dapat mengungkapkan penilaiannya atas keindahan lanskap dengan peringkat numerik. Setiap pemandangan lanskap dapat diberi peringkat dari skala misalnya, 1 (keindahan pemandangan sangat rendah) hingga 10 (keindahan pemandangan sangat tinggi). Penggunaan skala penilaian mengharuskan pengamat untuk menetapkan beberapa nilai kriteria yang terurut dan terpisah. Kriteria untuk menawarkan peringkat “1” akan lebih rendah daripada untuk “2”, dan nilai tertinggi (kriteria paling ketat) akan disediakan untuk penilaian “10” (Daniel & Boster, 1976).

Ambiguitas yang diperkenalkan oleh perbedaan dalam nilai kriteria pengamat dapat dihilangkan. *Scenic Beauty Estimation* (SBE) memberikan ukuran keindahan lanskap yang independen dari kriteria penilaian pengamat. SBE adalah nilai skala relatif yang dihitung dari peringkat masing-masing pengamat dari sejumlah pemandangan lanskap yang berbeda. Pendapat bahwa keindahan adalah konsep interaktif langsung diwakili dalam model SBE. Pengukuran keindahan pemandangan tidak sepenuhnya berasal dari karakteristik lanskap, dan preferensi pengamat



(peringkat) yang dinyatakan tidak dianggap sebagai indeks langsung dari keindahan yang dirasakan. Nilai keindahan pemandangan berasal dari penilaian yang dibuat oleh sejumlah pengamat untuk berbagai lanskap. Peringkat pengamat disesuaikan untuk memperhitungkan pengaruh kriteria penilaian yang berbeda. SBE yang dihasilkan memberikan indeks kuantitatif keindahan pemandangan yang dirasakan dari lanskap (Daniel & Boster, 1976).

Metode SBE dapat digunakan untuk menilai keindahan kawasan di sekitar objek dan atraksi wisata maupun jalur wisata yang akan dikembangkan hasil dari analisis potensi objek dan atraksi wisata melalui presentasi dalam foto-foto berwarna, dimana foto-foto tersebut merupakan pemandangan yang diambil dari kawasan yang dianggap mewakili kondisi tapak dari objek dan atraksi wisata hasil analisis daerah rencana pengembangan ekowisata (Wakyudi, 2016). SBE memiliki tiga langkah utama: (1) mewakili lanskap dengan image berwarna; (2) menyajikan image kepada pengamat, dan (3) mengevaluasi penilaian pengamat.

Populasi pengamat yang relatif homogen, antara 20 dan 30 pengamat adalah sampel yang memadai. Untuk beberapa percobaan, kurang dari 20 pengamat telah memberikan sensitivitas yang cukup untuk perbandingan statistik SBE (Daniel & Boster, 1976). Menurut Daniel dan Boster (1976) dalam (Wakyudi, 2016), bahwa penilaian *image* dilakukan secara spontan akan membuat responden lebih bersikap jujur dalam menilai dan dengan durasi maksimal waktu 8 detik dianggap cukup untuk



memperoleh penilaian secara spontan pengamat. Hasil akhir dari metode SBE adalah kriteria keindahan suatu lanskap yang dikategorikan ke dalam kriteria rendah dengan nilai SBE < -20 , kriteria sedang dengan nilai $-20 < \text{SBE} < 20$, dan kriteria tinggi dengan nilai SBE > 20 .

I. Analisis Medan Kekuatan

Analisis Medan Kekuatan (*Force Field Analysis*) dikembangkan oleh Kurt Lewin (1951) dan secara luas telah digunakan untuk pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dalam organisasi (Adhanita, 2013). Sianipar dan Entang (2001) dalam Aliyah (2003) menyatakan analisis medan kekuatan adalah suatu model analisis untuk pemetaan kekuatan organisasi. Dengan mengetahui peta kekuatan akan dapat dilihat arah yang dituju dan menyusun strategi pemanfaatan faktor unggulan pendorong yang paling potensial untuk mencapai sasaran dan mengurangi kekuatan faktor penghambat. Konsep dasar analisis medan kekuatan adalah bahwa setiap upaya melakukan perubahan ada kekuatan pendorong dan penghambat. Dengan analisis medan kekuatan dapat digambarkan dan dinilai kekuatan penggerak sejumlah faktor pendorong (*driving force*) dan faktor penghambat (*resistence force*) dalam membuat suatu perubahan kinerja organisasi dari satu posisi ke arah posisi yang diinginkan organisasi.



Langkah-langkah proses analisis medan kekuatan adalah sebagai berikut (Adhanita, 2013):

1. Tentukan target yang akan diubah;
2. List semua faktor pendorong yang mendorong terjadinya perubahan tersebut (di bagian kanan);
3. List semua faktor penghambat yang menghambat terjadinya perubahan tersebut (di bagian kiri);
4. Beri nilai pada setiap faktor tersebut, yang menunjukkan seberapa besar kekuatannya pada target: 1 (lemah) s/d 3 (kuat);
5. Analisa sejauh mana kita mampu berbuat sesuatu untuk mempengaruhi/merubah faktor-faktor tersebut, dan beri nilai yang menunjukkan seberapa besar kemampuan kita untuk merubah faktor-faktor tersebut.

J. Kerangka Pemikiran

Kawasan TWA Lejja dan daerah penyangga yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sisi fungsi dan daya dukung lingkungan merupakan bagian dari lanskap Desa Bulue. Namun demikian, dalam pengelolaannya masih terdapat permasalahan antara lain: belum adanya sinergi pengembangan potensi wisata alam lanskap Desa Bulue sebagai kawasan strategis, aktivitas wisata alam yang cenderung bersifat masal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan adanya potensi kerusakan keindahan lanskap Desa Bulue oleh aktivitas mata

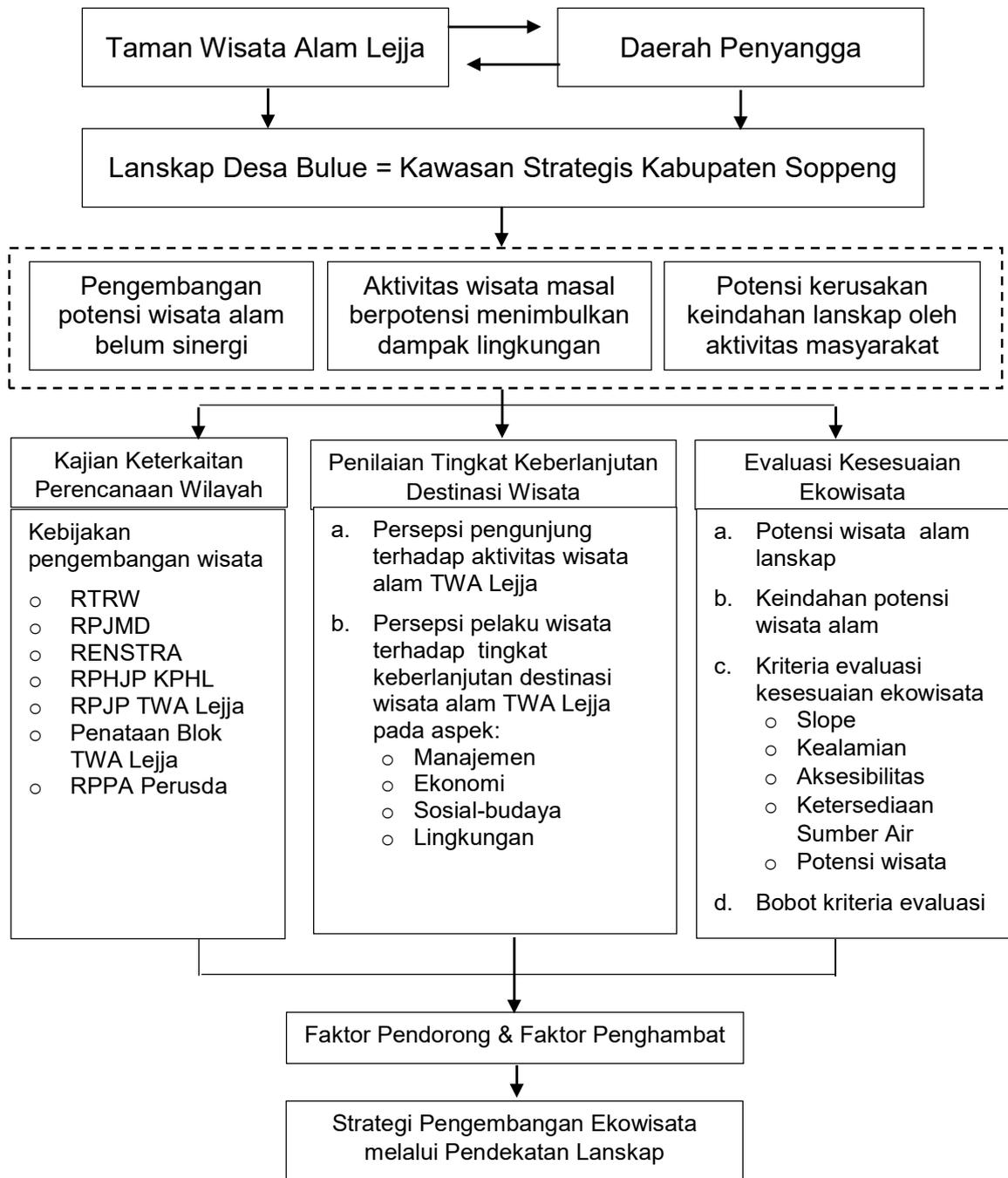


pencaharian masyarakat daerah penyangga. Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan strategi yang dapat mendorong pengembangan ekowisata melalui pendekatan lanskap.

Ekowisata merupakan bagian dari strategi pengelolaan kawasan lindung. Sementara itu, pendekatan lanskap adalah pendekatan yang mengakomodasi berbagai kepentingan terkait penggunaan lahan yang saling bertentangan yaitu fungsi ekonomi yang bersifat ekstraktif dan fungsi jasa lingkungan yang bersifat konservatif. Berdasarkan dua hal tersebut, pengembangan ekowisata melalui pendekatan lanskap dapat digunakan sebagai strategi pengelolaan kawasan.

Dalam rangka merumuskan strategi pengembangan ekowisata melalui pendekatan lanskap (Gambar 1), keterkaitan perencanaan wilayah berupa kebijakan pengembangan wisata pada daerah penyangga dan TWA Lejja dengan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng perlu diketahui melalui studi pustaka dokumen perencanaan. Pemandian air panas TWA Lejja yang telah menjadi destinasi wisata masal juga perlu dinilai tingkat keberlanjutannya dari aspek manajemen, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kemudian, kesesuaian ekowisata lanskap Desa Bulue juga perlu dievaluasi menggunakan analisis keputusan multikriteria dan estimasi keindahan pemandangan. Berdasarkan hasil kajian-kajian tersebut di atas diperoleh faktor pendorong dan faktor penghambat. Selanjutnya analisis medan kekuatan dipilih untuk menghasilkan prioritas

perencanaan dan ide-ide strategis dalam pengembangan ekowisata melalui pendekatan lanskap.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran